

- 2011/2012
- 01/01/2012

SKRIPSI

kk
Dag 03/02
Sis
P

DIDIT PRATUDI SIDHARTA

**PERJANJIAN JUAL BELI VALUTA ASING MELALUI
PEDAGANG PERANTARA**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERJANJIAN JUAL BELI VALUTA ASING MELALUI
PEDAGANG PERANTARA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342

Penyusun,



Didit Prayudi Sidharta
NIM. 039714584

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum pihak – pihak dalam perjanjian jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara timbul karena adanya perikatan. Perikatan – perikatan tersebut merupakan perikatan yang bersumber pada perjanjian – perjanjian yang saling mendukung hingga dapat dilaksanakannya jual beli valuta asing oleh Nasabah. Hubungan hukum yang pertama timbul antara pihak Nasabah dengan *Account Executive* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Broker*. Hubungan hukum mereka ini timbul karena adanya perjanjian pemberian kuasa dari Nasabah ke *Broker*. Disini kedudukan Nasabah adalah sebagai pihak pemberi kuasa dan *Broker* sebagai penerima kuasa. Kuasa tersebut dimaksudkan agar *Broker* mewakili Nasabah untuk melakukan jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Berdasarkan kuasa ini sebenarnya *Broker* dapat saja melakukan jual beli bagi Nasabah secara langsung tanpa pemberitahuan, namun pada prakteknya segala jual beli selalu atas sepengetahuan dan seijin Nasabah. Selanjutnya perikatan yang timbul akibat perjanjian antara Pedagang Perantara dengan Nasabah. Disini kedudukan Pedagang Perantara adalah sebagai seorang perantara yang hampir sama dengan kedudukan seorang *Comissionair* sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Pedagang Perantara atas kedudukannya tersebut berhak untuk mendapatkan komisi atas setiap



transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, namun agar Nasabah dapat melakukan jual beli valuta asing ia harus menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Nasabah disini berkedudukan sebagai pihak yang memanfaatkan jasa Pedagang Perantara untuk melakukan jual beli valuta asing dengan pihak *Counter Party* yaitu pihak lain yang nantinya bertindak sebagai lawan main Nasabah dalam membeli atau menjual valuta asing. Yang terakhir adalah perjanjian jual beli valuta asing, pada perjanjian ini para pihaknya adalah Nasabah dengan *Counter Party*. Di sini kedudukan Nasabah bisa menjadi penjual namun disuatu saat bisa menjadi pembeli tergantung kepada kecenderungan *kurs* valuta asing kearah naik atau turun. Pihak *Counter Party* berkedudukan sebagai penjual dan pembeli pula, namun kelebihanannya bahwa pihak inilah yang akan menawarkan *kurs* jual dan beli dari valuta asing. Disamping semua perikatan yang terjadi tersebut, ternyata jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara ini memiliki karakter untung – untungan, yaitu suatu karakter dimana dalam memperoleh keuntungan di perlukan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dari penjelasan tersebut di dapat bahwa jual beli valuta asing merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam tindakan mengambil resiko yang juga termasuk dalam golongan taruhan.

- b. Ada beberapa kemungkinan Perbuatan wanprestasi yang dapat dilakukan oleh Pedagang Perantara yaitu:
 - 1. Pedagang Perantara menyalahgunakan peruntukan keuangan milik nasabah;

2. Pedagang Perantara tidak mengirimkan laporan-laporan transaksi ke alamat nasabah.

Pedagang Perantara memiliki kewenangan untuk mempergunakan keuangan milik Nasabah, namun kewenangan tersebut telah di batasi dengan adanya kewajiban untuk hanya mempergunakan keuangan tersebut bagi kepentingan transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah namun dengan adanya kewenangan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan penggunaan keuangan nasabah bagi kepentingan Pedagang Perantara. Selain itu ada pula beban yang di berikan kepada Pedagang Perantara untuk menyampaikan laporan tentang transaksi yang telah dilakukan oleh Nasabah sehingga ia tahu apakah order-order yang ia berikan telah dilaksanakan dengan layak atautkah tidak, selain itu dari catatan tersebut akan dapat diketahui tentang keadaan keuangan Nasabah yang sebenarnya. Kedua perbuatan tersebut akan dapat mengakibatkan kerugian di pihak Nasabah, namun karena adanya karakter untung – untungan diatas maka berdasarkan pasal 1788 BW negara tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian yang terjadi di pihak Nasabah karena kerugian yang terjadi tersebut masih dalam ruang lingkup Pertaruhan. Dengan demikian maka jelas bahwa Pedagang Perantara tidak memiliki tanggung gugat atas perbuatan wanprestasinya.